Pengadaan Barang dan Jasa di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat Pasca Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012

Latar belakang

Sebuah aturan baru saja dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah setelah sebelumnya mengeluarkan perubahan kedua Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dalam bentuk Perpres 70 Tahun 2012. Aturan tersebut adalah Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal yang melatar belakang dikeluarkannya Perpres ini berawal dari informasi yang diperoleh UP4B mengenai adanya ketidakpuasan rakyat Papua karena tidak adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi langsung dalam pengadaan barang/jasa, utamanya dalam pembangunan kawasan Papua. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta guna memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada orang asli Papua dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, perlu diatur beberapa pengecualian yang bersifat khusus dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres 54/2010 sebagaimana telah dua kali diubah dengan Perpres 70/2012.

Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terukur, dan sinergis guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Dasar pemikiran dikeluarkannya Perpres ini adalah:

- a. Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sesuai semangat Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
- b. Memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada orang asli Papua dalam pengadaan barang/jasa

Hal-hal yang diatur dalam Perpres 84 Tahun 2012

Beberapa perubahan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya adalah:

1. Pada prinsipnya, paket pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000, 00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung.
2. Paket pekerjaan yang bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dapat dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung untuk:
 - a. Kabupaten Nduga;
 - b. Kabupaten Yahukimo;

- c. Kabupaten Intan Jaya;
 - d. Kabupaten Puncak Jaya;
 - e. Kabupaten Puncak;
 - f. Kabupaten Tolikora;
 - g. Kabupaten Memberamo Tengah;
 - h. Kabupaten Yalimo;
 - i. Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - j. Kabupaten Deiyai;
 - k. Kabupaten Dogiyai;
 - l. Kabupaten Paniai;
 - m. Kabupaten Jayawijaya; dan
 - n. Kabupaten Lani Jaya.
3. Pengadaan langsung tersebut dapat dilakukan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan dan hanya diperuntukkan bagi pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan kualifikasi
 4. Apabila tidak ada pengusaha lokal yang memenuhi persyaratan kualifikasi, maka dilakukan dengan pelelangan umum yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa dari luar Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota namun harus bermitra dengan pengusaha lokal melalui perjanjian KSO/Kemitraan
 5. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan dengan pelelangan umum, maka calon penyedia dari luar provinsi dan/atau kabupaten/kota harus bermitra dengan pengusaha lokal melalui perjanjian KSO/Kemitraan.
 6. Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), pengusaha lokal tidak diwajibkan memenuhi persyaratan kualifikasi mengenai Kemampuan Dasar (KD)
 7. Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), apabila penyedia barang/jasa dari luar provinsi dan/atau Kabupaten/Kota tidak bermitra dengan pengusaha lokal, maka penyedia barang/jasa dimaksud harus mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada pengusaha lokal.
 8. Pengusaha lokal yang mengikuti pengadaan langsung tidak diwajibkan memiliki pengalaman sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak
 9. Apabila tidak ada personil yang memenuhi persyaratan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, maka persyaratan tersebut dapat diganti dengan sertifikat mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa
 10. Kebijakan pemaketan oleh SPKD harus berpihak kepada pengusaha lokal dan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi pengusaha lokal tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan
 11. Proses pengadaan barang/jasa yang sedang dilakukan dan belum ditetapkan pemenangnya langsung disesuaikan dengan Perpres ini.

Sumber:

<http://pupapua.net/front/file/artikel/9721257AB7EE950F3AC7.docx>.

<http://www.antaraneews.com/berita/343005/lkpp-perpres-842012-percepat-pembangunan-papua>